

ANALISIS PROSES PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN MENJADI KABUPATEN DI KABUPATEN KARIMUN

(Studi Kasus Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur)

Firmansyah Putra (20140520053)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: sfgeneral07@gmail.com

Realisasi Otonomi Daerah mengharuskan tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Adanya Otonomi Daerah tidak lepas dari telah diubahnya sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya sentralistik menjadi Desentralisasi yang demokrasi. Kesempatan ini ditangkap oleh Pemerintah Daerah sehingga masing-masing daerah berlomba untuk mengelola hasil alam maupun sumber daya manusianya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten. Penelitian ini menggunakan teori otonomi daerah dimana proses pemekaran suatu wilayah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang diambil menggunakan tehnik wawancara dan observasi.

Hal ini terjadi pula di Kabupaten Karimun, tepatnya di Kecamatan Pulau Kundur, dimana sebagian dari masyarakat di Kecamatan ini menuntut kepada pemerintah untuk memisahkan diri dari Kabupaten Karimun dan membentuk Kabupaten baru. Timbulnya alasan keinginan sebagian masyarakat untuk pisah dari Kabupaten Karimun adalah seperti yang diketahui bahwa Kecamatan Pulau Kundur memiliki prediket sebagai penghasil karet di Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), sehingga memiliki asumsi bahwa kecamatan ini layak menjadi kabupaten, alasan lainnya juga bahwa masyarakat lokal Kundur menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun dinilai kurang mampu bersikap adil terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Sedangkan tujuan utama dari pencapai proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten ini adalah untuk mensejahterkan kehidupan masyarakat pulau Kundur agar fasilitas infra struktur dan supra struktur dapat dibangun di pulau Kundur ini. Namun pada kenyataannya Kundur mengalami kendala utama seperti Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) 2016 tidak dianggarkan untuk pemekaran wilayah, sehingga anggaran dari Pemerintah Pusat tidak bisa turun, dan hingga saat ini pemekaran wilayah kecamatan Kundur ini terhenti sampai di tahun 2017 akhir.

Dalam penelitian ini dapat menjawab tentang permasalahan yang ada, yaitu analisi proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten Kepulauan Kundur, dalam kasus wacana pemekaran wilayah ini terdapat kelompok yang muncul dari aspirasi masyarakat yang bernama Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) Kelompok ini sebagai pilar utama dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Karimun, dikarenakan mereka sebagai aktor utama dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Karimun ini. Jika Kecamatan Kundur

berhasil menjadi kabupaten secara otomatis lapangan kerja akan bertambah dan kursi di pemerintahan dengan pasti akan mudah didapatkan, kedua adalah bidang Ekonomi yang berkaitan dengan perebutan hasil Sumber daya alam (SDA) di Kecamatan Kunder. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meredakan konflik antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pemekaran wilayah ini dengan memberikan himbauan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu menyesatkan. Seharusnya pemerintah bisa bertindak lebih tegas dengan tidak hanya memberikan himbauan kepada masyarakat Kunder tidak termakan isu-isu yang nantinya akan berimbas kepada Pemerintah.

Kata Kunci: Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan Menjadi Kabupaten

A. PENDAHULUAN

Pada masa orde baru telah berakhir perubahan-perubahan cukup mendasar telah terjadi di dalam segala aspek. Salah satu perubahan yang membawa angin segar bagi daerah adalah dilaksanakannya otonomi luas yang memberi wewenang dan hak yang luas kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Dan ketika pada masa orde baru kewenangan atas daerah sangat terbatas akibat besarnya kontrol pemerintah pusat.

Sedangkan masa reformasi karena demokrasi terbuka cukup lebar disertai semangat demokrasi dan desentralisasi, otonomi luas menjadi salah satu kebijakan penting. Perubahan terjadi pada tatanan daerah, karena daerah diberi otonomi yang luas dengan prinsip nyata dan bertanggungjawab. Hal tersebut tentunya akan sangat berbeda pada masa orde baru dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik.

Untuk masalah pelayanan publik selama ini masyarakat Pulau Kunder banyak mengeluh rumit mengurus administrasi ke Pulau Karimun Besar disamping tempat yang jauh dan akses menuju pulau tersebut hanya bisa menggunakan perahu atau kapal kecil dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar maka dari itu terbentuklah wacana pemekaran wilayah kabupaten baru yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan pembangunan yang merata.

(www.haluankepri.com news detail bp2k3 ingin jawaban anggota dewan diakses pada tanggal 5 Mei 2018)

Dari situ masyarakat lokal berkeinginan memperpendek pelayanan pemerintah, dan pembangunan yang merata sehingga masyarakat pulau kundur ikut merasakan pelayanan yang semestinya mereka dapatkan. Apabila terjadi pemekaran maka jumlah penduduk Kundur Utara, Kundur Selatan, dan Kundur berjumlah 71.565. Jumlah tersebut di dapat dari total 3 kecamatan yang luas wilayahnya mencapai 68.418,00 ha.

Tabel 1.1

**Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun
Menurut Kecamatan Tahun 2015**

NO	Kecamatan	Luas Daratan (Ha)	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Moro	44.792,39	18.348	41
2	Durai	6.298,27	6.472	103
3	Kundur	8.373,70	29.681	354
4	Kundur Utara	24.564,71	11.751	48
5	Kundur Selatan	18.992,39	17.359	91
6	Ungar	5.552,94	6.128	110
7	Belat	10.934,26	6.646	61
8	Karimun	5.976,47	44.666	747
9	Buru	7.339,79	9.462	129
10	Meral	5.785,47	38.831	671
11	Tebing	7.634,60	24.415	320

12	Meral Barat	6.155,02	12.107	197
	Jumlah	152.400,00	225.866	

**Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2015*

Atas dasar Pertimbangan ekonomi, politik, sosial budaya, administrasi pemerintahan, pertahanan keamanan dan pertimbangan lainnya muncul suatu bentuk partisipasi masyarakat yang di beri nama Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3), Badan ini bertujuan untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar segera terbentuk Pemekaran wilayah dalam rangka terselenggaranya otonomi daerah. Akan tetapi Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) terhambat dalam pemekaran wilayah dikarenakan terkendalanya anggaran dari pemerintah pusat. (*kepri.antaranews.com bp2k3 kecewa terhadap rekomendasi diakses pada tanggal 5 Mei 2018*)

Menurut Wildari Fauzan (2005) Tujuan utama yang hendak dicapai dari pemekaran wilayah tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi substansi politik dan sosial budaya, di wilayah Kundur tersebut. Dan daerah kabupaten nantinya sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan wilayah regional.
2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas terhadap pelaksanaan tata pemerintahan di daerah serta dapat mempercepat proses pemerataan pembangunan pada tingkat wilayah kecamatan sebagai suatu bentuk knerja pembangunan
3. Untuk meningkatkan sarana dan prasaran transportasi, sehingga mempermudah komunikasi antar wilayah dengan pusat pelayanan pemerintahan.
4. Tercapainya proses perencanaan pembangunan terkonsentrasi dan terkoordinasi dengan baik melalui pemerintahan Daerah Provinsi

5. Membuka kesempatan inverstasi antar daerah dan investasi luar negeri serta lapangan kerja baru bagi daerah kabupaten melalui berbagai sector pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang bersangkutan.
6. Mempermudah pelaksanaan pengawasan pembangunan oleh aparatur pengawasan pembangunan daerah kabupaten sehingga dapat memperkecil penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pembangunan oleh aparatur birokrasi.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodelogi penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian taraf pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif kualitatif, karena penganalisis partisipasi dilihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap proses pemekaran dan bagaimana respon masyarakat yang selama ini terjadi di daerah khususnya di daerah Pulau Kundur Kabupaten Karimun. Penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan dalam meneliti atau menganalisis status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Holid Narboko (2005:62)

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Karimun yang berlokasi di 3 kecamatan yakni kecamatan Kundur Utara, Kundur Selatan, Dan Kundur. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan di Pulau Kundur ini dikarenakan Pulau dengan 3 Kecamatan dan mempunyai luas wilayah yang cukup besar dan mempunyai sumber daya alam yang cukup baik sangat disayangkan ketika Infra struktur seperti pelayanan kesehatan dan fasilitas umum sangat minim disana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli, seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi terdapat 8 tingkatan, namun diantara dari 8 tingkatan tersebut hanya 3 yang termasuk dalam pembahasan ini, Aspirasi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan suatu kesepakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun sekelompok elemen masyarakat yang ikut untuk menyalurkan ide dan gagasan maupun pendapat yang berdasarkan kenyataan dilapangan dalam hal ini partisipasi yang secara keseluruhan tidak melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan suatu tindakan maupun keputusan melainkan dengan cara keterwakilan.

1. *Citizen control* (Kendali Masyarakat)

Adapun keikutsertaan masyarakat di dalam proses pemekaran ini, terlihat jelas berdasarkan hasil observasi di lapangan keikutsertaan masyarakat ini di iringi dengan segala tuntutan pemekaran dalam hal ini banyaknya masyarakat turun kejalan menuju kantor pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk menyalurkan aspirasi tentang pemekaran dan diikuti mengaspirasikan tuntutan-tuntutan sebagian besar masyarakat di Kundur,

Sikap netral yang diambil oleh pemerintah daerah membuktikan pemerintah daerah menghargai dan menyadari bahwa demokrasi di tengah masyarakat terus saja bergulir, karena ini menjadi barometer bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang menentukan yang terbaik untuk pembangunan negeri sendiri, dan berupaya untuk kritis terhadap kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah tentunya, dan ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat semakin berkembang

“ Kami sebagai masyarakat Pulau Kundur tetap tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah dengan pembangunan yang tidak merata, untuk menuju dermaga saja kami harus melewati jalanan yang hancur banyak yang berlubang ”

Menurut dari masyarakat diatas mengatakan alasan kenapa mereka ingin sekali Kundur menjadi Kabupaten adalah, yang pertama mereka berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak memperhatikan daerah-daerah tepencil di kampung yang sulit di jangkau hal tersebut dapat ditemukannya bahwa ada beberapa daerah yang masih tidak memiliki jalanan beraspal, yang ke dua mereka berpendapat bahwa kurangnya alat-alat fasilitas kesehatan dan tenaga kerja disana,

Padahal Kundur merupakan penghasil karet terbesar di Kabupaten Karimun tetapi mengapa pemerintah daerah tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada daerah tersebut, setidaknya pemerintah memberikan sedikit bantuan alat-alat kesehatan atau mengirimkan tenaga kerja berupa dokter khusus yang berpengalaman, dan memperbaiki atau membangun jalanan yang berlubang. Mungkin saja jika Pemerintah Daerah memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu wacana Kundur akan membentuk Kabupaten baru tidak akan terpikirkan oleh masyarakat sana.

Walaupun aspirasi masyarakat pulau Kundur kini telah didengar oleh pemerintah daerah yang dibantu oleh Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3), Kundur sudah melewati tahap persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini tengah mengalami proses tahap uji coba kelayakan sebagai kabupaten baru, namun sayangnya Kundur saat ini terkendala oleh anggaran dari pemerintah pusat dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tidak dianggarkan untuk pemekaran tidak hanya itu, Undang-undang mengenai pemekaran Kabupaten baru jauh berbeda dengan membentuk Kabupaten persiapan, Iskandar Selaku sekretaris BP2K3 mengatakan jika saja anggaran sudah turun tidak menutup kemungkinan pemekaran Kabupaten Kundur tidak akan tersendat seperti saat ini.

2. Consultation (Konsultasi)

Masyarakat sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia memiliki arti penting dalam proses pemekaran wilayah khususnya pemekaran wilayah di Kecamatan Kundur yang nantinya akan menjadi Kabupten Kundur.

“Sebenarnya mas, pemekaran wilayah di daerah pulau kundur tidak begitu diperlukan dikarenakan sebagian masyarakat disini sudah merasakan kenyamanan dengan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Pemekaran daerah tidak menjamin masyarakat kundur akan hidup sejahtera, semua itu kembali lagi pada pemerintah daerah, bagaimana mengatasi kasus tersebut dengan bijak.”

Di samping itu mereka juga mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur dengan setelah terjadinya proses pemekaran wilayah apa jadinya jika suatu wilayah yang berhasil di mekarkan tapi tidak dapat berkembang atau malah sebaliknya, yang ada masyarakat tidak sejahtera dan malah makin memburuk keadaan. Inti dari sebuah pemekaran wilayah adalah bagaimana agar suatu daerah yang sudah menjadi Kabupaten sendiri menjadi maju dan lebih baik, tidak malah menjadi ke arah sebaliknya semata-mata karna ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan kursi kekuasaan pemerintah daerah.

Pada tahun 2017 tercatat 16.940 jiwa masyarakat Karimun yang mengalami masalah kesenjangan sosial yang artinya hampir 18% dari total masyarakat pulau Kundur yang berjumlah 56.953 jiwa yang mengalami masalah kemiskinan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Karimun 2014-2017

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin			
	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (rupiah)	299.538	309.558	338.341	354.526
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	15.38	14.82	15.35	16.94

Persentase Penduduk Miskin (%)	6.85	6.60	6.77	7.41
--------------------------------	------	------	------	------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Karimun Tahun 2014 - 2017

Dari tabel diatas menunjukkan semakin tahun tingkat kemiskinan di Kabupaten Karimun mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan setiap tahunnya mengalami kenaikan hampir 1.000 jiwa pertahun jika hal tersebut tidak diatasi, tidak menutup kemungkinan juga angka 16.940 jiwa ini akan terus bertambah, terutama yang paling banyak mengeluh yaitu masyarakat Kundur dari hasil observasi lapangan.

Menurut dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun (BPS), mencatat jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2015

Kecamatan	Rumah sakit	Puskesmas Pembantu	Balai Kesehatan	Apotek	Dokter Praktek
Moro	-	2	-	66	4
Durai	-	1	-	16	1
Kundur	-	1	1	41	6
Kundur Utara	-	1	-	21	1
Kundur Barat	-	1	1	29	5
Ungar	-	-	-	14	-
Belat	-	-	-	20	-
Karimun	-	1	4	39	15
Buru	-	1	-	20	1
Meral	-	1	4	26	7
Tebing	2	1	-	24	6
Meral Barat	-	-	2	17	-
Jumlah	2	10	12	333	46

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2015.

Jika dilihat dari tabel diatas dari semua kecamatan di kabupaten Karimun, 3 calon kecamatan yang akan menjadi kabupaten yaitu, Kundur, Kundur Utara, dan Kundur Barat, sangat disayangkan fasilitas kesehatan disana bisa dikatakan minim hanya terdapat 3 puskesmas

pembantu di masing-masing kecamatan, tidak hanya itu untuk fasilitas kesehatan lainnya seperti dokter praktes hanya ada 8 dokter dari total 3 kecamatan tersebut untuk seukuran pulau Kundur sangat disayangkan sedikitnya fasilitas kesehatan disana.

“Adanya sikap pro dan kontra terhadap pemekaran wilayah kecamatan menjadi kabupaten ini tidak lepas dari sebab kepentingan semata, Salah satunya untuk mendapatkan kekuasaan di kursi pemerintahan, bisa dibbilang ini adalah cara yang praktis untuk memperoleh kedudukan.”

Adapun perbedaan dari konflik sebelum pembentukan Kabupaten Kundur adalah berupa adu wacana dan adu argumen dengan saling menghujat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, sedangkan konflik yang bisa terjadi seandainya kabupaten Kundur terbentuk dapat diprediksikan perebutan jabatan atau kursi dipemerintahan kabupaten baru. Permasalahan yang bila sudah menjadi isu nasional tentunya telah memiliki perhatian yang lebih oleh pemerintah pusat untuk apakah mengesahkan Kundur menjadi kabupaten atau tidak, sebenarnya ini akan berhasil atau tidak tergantung dari kerja sama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

3. Informing (Menginformasikan)

Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) bisa dikatakan LSM atau organisasi resmi yang tidak ada pengakuan dari masyarakat, Mengapa demikian. Dikarenakan Pembentukan dari lembaga Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) ini muncul dari sekelompok orang yang sangat ingin mendapatkan kedudukan kekuasaan di kursi pemerintahan namun wacannya dikemas dengan Bahasa yang baik,

“Sejauh ini kami sebagai aktor utama dalam proses pemekaran wilayah kecamatan Kundur menjadi Kabupaten Kundur sudah melalui banyak tahap, mulai dari mengitung skor dan prioritas, tidak hanya itu saat ini kami juga mengalami kendala dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tidak dianggarkan untuk Pemekaran dan aturan atau undang-undang mengenai pemekaran kabupaten baru jauh berbeda dengan membentuk Kabupaten Persiapan.”

Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) bahwa kelompok itu saat ini tengah berusaha bagaimana caranya agar proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten itu bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun pada kenyataannya saat ini mereka terhambat oleh beberapa faktor mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dianggarkan untuk pemekaran, sehingga anggaran dari pusat tidak bisa turun dikarenakan direncanakan pada tahun 2016 sudah disiapkan untuk 15 Kabupaten yang akan dimekarkan, dan aturan atau undang-undang mengenai pemekaran kabupaten baru saat ini jauh berbeda dengan membentuk Kabupaten Persiapan, Saat ini Kundur sedang dalam masa tahap uji coba dimana artinya Kundur akan di test apakah Kundur layak menjadi Kabupaten atau tidak, tetapi saat ini Kundur mengalami beberapa kendala dikarenakan terkendala oleh anggaran dari pemerintah pusat, untuk bisa melakukan tahap uji coba ini Kundur butuh anggaran dari pemerintah pusat. Untuk saat ini Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) sedang berusaha mengumpulkan data-data yang kuat biar bagaimana Kundur bisa menjadi Kabupaten di masa yang akan datang.

Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) disini adalah tidak hanya sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat Kundur tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten, di samping itu peran penting Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) Saat ini adalah mereka saat ini selalu mengusahakan bagaimana nantinya proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten bisa segera terwujud, dan syarat-syarat lainnya untuk pembentukan sebuah kabupaten baru. Tetapi saat ini Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) mengalami beberapa kendala seperti belum turunnya anggaran dari pemerintah pusat dikarenakan APBN 2016 tidak dianggarkan untuk pemekaran sehingga proses pemekaran wilayah Kundur ini

terhenti hingga saat ini, tidak hanya itu kendala yang dialami lainnya adalah aturan atau undang-undang mengenai pemekaran kabupaten baru, jauh berbeda dengan pembentukan kabupaten persiapan.

1. Tindakan Pemerintah Daerah Secara Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Proses Pemekaran

Beberapa tindakan pemerintah kecamatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung, tindakan langsung disini diartikan sebagai tindakan yang dalam penanganannya tidak memerlukan waktu yang lama, begitu juga sebaliknya. Ery Noval selaku kepala Camat Kundur bahwa upaya memberikan himbauan seperti ini telah diberlakukan sejak sebelum munculnya wacana pemekaran wilayah kecamatan menjadi kabupaten pada tahun 2013 lalu, Bupati Kabupaten Karimun dalam hal ini memberikan instruksi kepada Pemerintah di Kecamatan untuk menyampaikan himbauan tersebut.

Banyaknya selisih paham yang terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya konflik yang akan menciptakan kesulitan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat, karena waktu dan tenaga hanya akan dihabiskan untuk meredakan konflik. Dengan adanya himbauan tersebut memberikan sikap pemerintah yang masih mempercayai masyarakat kecamatan Kundur untuk bisa bekerjasama dalam menciptakan kehidupan pemerintah daerah yang baik.

Mengenai sikap pemerintah kecamatan yang terus memantau situasi masyarakat, dalam menghadapi pro dan kontra di kalangan masyarakat Kundur pemerintah kecamatan cenderung berusaha bersifat netral. Sikap netral yang diambil oleh pemerintah di tingkat kecamatan ini membuktikan bahwa Pemerintah kecamatan menghargai dan menyadari bahwa demokrasi di tengah masyarakat terus saja bergulir, karena ini menjadi barometer bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pengetahuan untuk menentukan yang terbaik untuk pembangunan negeri

sendiri, dan berupaya untuk kritis terhadap kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah tentunya, dan ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat semakin berkembang.

Selain itu, adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk tetap tidak diam dalam memperbaiki jalan-jalan yang berlubang meski hanya jalan utama menuju kota saja yang di perbaiki, dan sampai saat ini masih saja dilakukan perbaikan jalan meskipun jalan tersebut tetap saja rusak, hal ini disebabkan karena beban jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan yang melewati jalan tersebut setiap harinya, banyak keluhan yang terjadi di masyarakat ditujukan pada pemerintah mengenai pembangunan jalan ini, dan juga disebut-sebut sebagai alasan mengapa sebagian Masyarakat Kundur

D. KESIMPULAN

Citizen Control, Dalam proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten keinginan masyarakat adalah tahap awal dalam merancang rencana untuk pemekaran wilayah. Keinginan masyarakat Kundur ini dapat ditampung melalui aspirasi masyarakat Kundur kemudian Pemerintah Daerah menanggapi hal tersebut, Keikutsertaan masyarakat di dalam proses pemekaran ini, terlihat jelas berdasarkan hasil observasi di lapangan keikutsertaan masyarakat ini diiringi dengan segala tuntutan pemekaran dalam hal ini banyaknya masyarakat turun kejalan menuju kantor pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk menyalurkan aspirasi tentang pemekaran dan diikuti mengaspirasikan tuntutan-tuntutan sebagian besar masyarakat di Kundur.

Consultation, Konsultasi pada partisipasi masyarakat selanjutnya adalah dimana dari masing-masing kepala desa di 3 kecamatan berbeda dikumpulkan kemudian membentuk suatu musyawarah kecil, dimana di musyawarah tersebut akan membahas kenapa Kundur ingin memisahkan diri dari kabupaten Karimun, untuk memiliki alasan kuat agar nantinya Kundur akan segera terbentuk sebuah kabupaten baru. Meskipun terdapat beberapa masyarakat yang pro

dengan wacana tersebut dan ada juga yang kontra namun hal tersebut tidak menjadi masalah besar bagi Kunder untuk segera menjadi kabupaten baru.

Dari musyawarah tersebut Proses selanjutnya dalam pemekaran wilayah lahirnya suatu Kelompok dimana Kelompok tersebut sebagai gerakan dan pemersatuan seluruh masyarakat Kecamatan Kunder yang sama-sama berkeinginan Kunder segera menjadi Kabupaten, yang biasa disebut sebagai Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder (BP2K3), tidak hanya itu badan juga berperan penting dalam proses pemekaran wilayah di pulau Kunder yang nantinya akan menjadi sebuah kabupaten baru.

Informing, Lewat informasi badan ini bertanggung jawab penuh atas semua informasi yang telah didapat kemudian akan disebarkan kepada masyarakat kunder untuk mengetahui perkembangan proses pemekaran wilayah Kunder untuk saat ini, Setelah Badan ini terbentuk mereka sebagai aktor utama dalam pemekaran wilayah Kunder dikarenakan masyarakat Kunder sudah menaruh kepercayaannya kepada Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder (BP2K3), Saat ini mereka sudah melewati tahap penghitungan skor dan prioritas kabupaten-kabupaten yang ingin dimekarkan sampai dengan menghitung jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Namun saat ini Kunder mengalami beberapa kendala seperti APBN 2016 tidak dianggarkan untuk pemekaran sehingga anggaran dari pemerintah pusat tidak bisa turun hal tersebut tentu menjadi permasalahan besar, untuk bisa melakukan tahap uji coba Kunder membutuhkan anggaran dari pemerintah pusat.

Tindakan Pemerintah Daerah Secara Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Proses Pemekaran

Sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kecamatan dalam menangani kasus antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap proses pemekaran yang terjadi di kecamatan Kunder

adalah berikap netral dalam arti tidak memberikan dukungan penuh kepada masyarakat yang sedang berkontroversi tersebut, dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh terhadap isu ataupun wacana yang ada yang nantinya akan membawa pada keadaan menjadi tidak kondusif adalah bentuk tindakan secara persuasif yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kunder ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chambers Robert, *Ideals For Development*, London: Earthscan, 2005

Dadang Juliantara, *Pembaharuan Kabupaten*, Pustaka Yogyakarta Mandiri, 2004.

Drs. Holid Narbuko, Drs. H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Dwidjowijoto, R.N. *Otonomi Daerah : Desentraslisasi Tanpa Revolusi*. PT. Elex Media Kompotindo. Jakarta. 2000.

F.X. Sudarsono, *Penelitian Pendidikan*, FIB Yogyakarta, 1998.

Hessel, Nogi. *Manajemen Publik*. PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2005.

Kaloh, J, D R. *Mencari bentuk otonomi daerah*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.

Kansil, D. C. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. 1993.

Kencana Syafie M.si, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Rajawali, Jakarta, 2000.

Keith Davis, Dalam santoro Sastropetro, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Alumni Bandung, 1998.

Koentjaraningrat, *Dalam ketetapan-ketetapan MPR RI tentang GBHN*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993.

Linton, Dalam abu Ahmadi, *Sosiologi dan Antropologi*, CV. Pelangi Surabaya. 1985.

Mubyarto, *Strategi Pembangunan Desa Terpadu*, UGM Yogyakarta, 1993.

MM. Billah, *Diklat Hubungan Negara Dan Masyarakat Sipil*, Pusaka Pelajar, 2000.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA. 2007.

Sarundajang. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, KATA, Surakarta. 2003.

Supriatna, *Kekuatan Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Syarat Bagi Pembaharuan Kabupaten*, Jakarta, 1998.

Talizidhuhu Ndraha, *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Wildari Fauzan, *isu-isu Perencanaan Strategis Dalam Rangka Pemekaran Wilayah Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatra Barat, Ilmu Pemerintahan*. 2005.

Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret Univerisity, Surakarta, 1994.

Jurnal :

Muhammad Arafat Abdullah. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah*. Jurnal Institut Pertanian Bogor. 2011.

Wijaksono Sigit, *Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman*, Jurnal Com Tech Vol.4 No.1, 2013.

Skripsi :

Aqmarina, *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kota Lhokseumawe*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatra Utara : USU. 2015.

Gagas Ariasakti Winata, *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Perekonomian dan Kinerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten*. Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor : IPB. 2016.

Hasriani, *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tafagapi Kec. Menui Kabupaten Morowali*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Halu Oleo Kendari : UHO. 2016.

Hasrianto, *Pengaruh Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamuju Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Botteng Kec. Simboro*. Skripsi. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik. UIN Alauddin Makassar. 2014.

Ira, Selda. *Kontroversi Pemekaran Wilayah Kecamatan Menjadi Kabupaten*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa : APMD. 2007.

Muhammad Rifki Pratama. *Politik Pemekaran Wilayah (Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. UINJKT. 2010.

Saiful Anwar. *Pemekaran Wilayah Bone Selatan*. Skripsi. Jurusan Politik Pemerintahan. Universitas Hasanuddin Makassar: UNHAS. 2014.

Yori Tirta Kusuma, *Pengaruh pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Kec. Pagelaran dan Kec. Pagelaran Utara Kabupaten Pring Sewu)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Bandar Lampung : UNILA. 2017.

Tesis :

Evin Pratiwi, *Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bogor dan Kota Depok*. Tesis. Magister Ilmu Ekonomi. Institut Pertanian Bogor. 2011.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Daerah (Pembaharuan)

Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Wilayah

Wawancara :

Wawancara Zohri. Selaku Masyarakat Pesisir Kecamatan Kundur Barat. Tanggal 31/8/2018

Wawancara Ery Noval Jadinata,S.STP. Selaku Kepala Camat Kundur. Tanggal 29/8/2018

Wawancara Syafri Ilham. Selaku Staff Kecamatan Kundur. Tanggal 5/9/2018

Wawancara Paiman. Selaku Tokoh Masyarakat Parit Baru. Tanggal 29/8/2018

Wawancara Said Masri. Selaku Masyarakat lokal Kundur. Tanggal 27/8/2018

Wawancara Saharudin. Selaku Tokoh Masyarakat Kundur Utara. Tanggal 1/9/2018

Wawancara Iskandar. Selaku Sekretaris BP2K3. Tanggal 3/9/2018

Wawancara Zainal. Selaku Masyarakat Pedalaman Kecamatan Kundur. Tanggal 1/9/2018

Wawamcara Efendi. Selaku Tokoh Masyarakat Kundur Barat. Tanggal 1/9/2018

WEBSITE :

<https://batamtoday.com/index.php/home/read/17155/BP2K3-dan-Warga-Kundur-Ancam-Demo-Bupati-Karimun> diakses pada tanggal 11 Oktober 2018

<http://www.riapos.co/19370-berita-bp2k3-ancam-mobilisasi-massa-.html#.W9s2q5MzaUk> diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

<https://www.haluankepri.com/news/detail/24464/bp2k3-ingin-jawaban-ketua-dewan> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

<https://kepri.antarane.ws.com/berita/21431/bp2k3-kecewa-terhadap-rekomendasi-kabupaten-kundur> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

<https://karimunkab.go.id/2016/10/23/gambaran-umum-daerah-kabupaten-karimun/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018